

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badriyah, Siti, Siti Mahmudah, dan Amiek Soemarmi, *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*, Semarang: Penerbit Tiga Media, 2019.
- Hayati, Tri, dkk., *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Muttalib, M. A., dan Muhd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*, New Delhi: Sterling Publisher Pvt. Ltd., 1983.
- Nursadi, Harsanto (Ed.), *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2018.
- Sadu Wasistiono, dan Petrus Polyando, *Politik Desentralisasi di Indonesia*, Sumedang: IPDN Press, 2017.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan dalam Perspektif Lingkungan Hidup (Implementasi, Kendala, dan Solusi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Soemarmi, Amiek, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, Semarang: Undip Press, 2016.
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1966.

JURNAL

- Abraham Ethan Martipa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4 (2023): 73–81.
- Badriyah, Siti Malikhatun, Siti Mahmudah, dan Amiek Soemarmi, *Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Kapal Bagi Nelayan Kecil di Kota Pekalongan*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2 (2019): 205.
- Dyan Franciska, "Disiplin Subsidi Perikanan dalam Sistem Perdagangan Global dan Implikasinya bagi Perikanan Indonesia," *Veritas et Justitia*, Vol. 5, No. 1 (2019): 156.
- Masyhuri Imron, "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 1 (2003): 65–66.
- Muhayat dan Rina Haslita, "Implementasi Desentralisasi dalam Pengelolaan Perikanan," *Jurnal JAPS*, Vol. 2, No. 2 (2021): 110.

- Rizqiyah, Qoidatur, Amiek Soemarmi, dan Amalia Diamantina, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Perikanan dalam Urusan Bidang Perikanan Budidaya di Kabupaten Jepara*, Disertasi Doktoral, Universitas Diponegoro, 2019.
- Siti Romlah, “Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif),” *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1 (2021): 3.
- Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, “Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia oleh Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan,” *Jurnal Litigasi*, Vol. 18, No. 2 (2017): 322.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41.
- Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati Jepara Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.

ARTIKEL

- Anwar Hidayat, “Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh,” *Statistikan*, tersedia pada <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> (diakses pada 01 Januari 2026).
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, “Layanan Cepat Asuransi Nelayan Mandiri melalui Gerai SiMANTEP di Kabupaten Cilacap,” tersedia pada <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/inovasi.php?id=1734> (diakses pada 13 November 2020).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, “KUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan,” tersedia pada <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5374-kusuka-kartu-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan> (diakses pada 13 Desember 2025).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Sosialisasi Asuransi Awak Kapal dalam Rangka Pemenuhan HAM Perikanan,” tersedia pada <https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi/artikel/17416-sosialisasi-asuransi-awak-kapal-dalam-rangka-pemenuhan-ham-perikanan> (diakses pada 13 November 2020).
- Kementerian Luar Negeri RI, “Indonesia Kedepankan Kepentingan Nelayan Kecil dalam Perundingan Subsidi Perikanan di WTO,” tersedia pada <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1672/berita/indonesia-kedepankan-kepentingan-nelayan-kecil-dalam-perundingan-subsidi-perikanan-di-wto> (diakses pada 19 September 2025).
- Kementerian Luar Negeri RI, “KKP Dorong Optimalkan Pengelolaan Perikanan di Laut Lepas dan ZEE,” tersedia pada <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dorong-optimalkan-pengelolaan-perikanan-di-laut-lepas-dan-zee65c1bd5cf241e.html> (diakses pada 19 September 2025).
- The National Team for The Acceleration of Poverty Reduction, “Pendataan Rumah Tangga Miskin di Wilayah Pesisir/Nelayan,” tersedia pada <http://tnp2k.go.id/downloads/pendataan-rumah-tangga-miskin-di-wilayah-pesisirnelayan> (diakses pada 13 Oktober 2025).

SUMBER LAINNYA

- Ghozali, *Nelayan*, wawancara media, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=GYv8rfH0U58> (diakses 11 Desember 2025).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)*, Background Study RPJM Kelautan dan Perikanan 2015–2019, 19.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)*, Background Study RPJM Kelautan dan Perikanan 2015–2019, 23.
- Nur Kusumawati, Skripsi: “Analisis Ekonomi Basis dan Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara,” (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2013), 35.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi: Ringkasan Eksekutif*, (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2019), 31.